



BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Bank BTPN

Bank Tabungan Pensiunan Nasional atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bank BTPN adalah Bank Umum Swasta Nasional yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa perbankan untuk masyarakat umum. Bank BTPN didirikan di Bandung melalui izin operasional dari Menteri Keuangan RI tanggal 2 Desember 1986. Namun dilihat awal berdirinya, Bank BTPN telah berdiri sejak 42 tahun yang lalu tepatnya pada tanggal 5 Februari 1958 dengan nama Bank Pegawai Pensiunan Militer (BAPEMIL). Tujuan didirikannya BAPEMIL saat itu adalah untuk membantu para cacat veteran, purnawirawan beserta janda dan yatim piatu yang pada saat itu umumnya mengalami kesulitan ekonomi dan terjerat oleh cengkraman rentenir. Tujuan lainnya adalah untuk membantu pensiunan di Indonesia.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992, PT. BTPN yang semula berstatus sebagai “Bank Tabungan” menyesuaikan statusnya menjadi “Bank Umum” yang disahkan melalui SK. Menteri Keuangan RI tanggal 22 Maret 1993 No. KEP. 005/KM. 17/1993. Dengan ditetapkan status Bank Umum tersebut, keberadaan Bank BTPN secara operasional sama dengan bank umum lainnya. Namun demikian, meskipun memiliki kesempatan luas untuk meningkatkan serta mengembangkan usahanya, Bank BTPN tetap konsisten dalam menjalankan pelayanannya kepada para pensiunan yang merupakan pangsa pasar pada umumnya dengan tetap mengacu pada tujuan perusahaan sebagaimana ditetapkan di dalam anggaran dasar perusahaan.

Ditengah-tengah persaingan dunia usaha yang semakin ketat dan kompetitif ini, serta pengaruh badai krisis moneter yang berkepanjangan sangatlah berpengaruh terhadap lembaga perbankan yaitu dengan dilikuidasinya (BBO/BBK) serta diambil alihnya (*take over*) sejumlah bank oleh pemerintah, Bank BTPN tetap survive menjalankan usahanya, hal ini dapat dibuktikan dengan penilaian Bank Indonesia melalui suratnya Nomor 31/50/DIR/UpwB2 tanggal 22 Maret 1999, tentang hasil Due Diligence posisi Necara 30 Juni 1998, bahwa Bank BTPN masuk dalam kelompok bank kategori "A", sehingga tidak perlu mengikuti program rekapitulasi, dengan rasio kecukupan modal (CAR) di atas 4%.

Hingga saat ini, Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) yang berkantor pusat di Bandung, tidak termasuk ke dalam daftar bank dalam program penyehatan dan rekapitulasi. Kinerja usaha Bank BTPN dinilai sangat baik, hal ini dapat dilihat dari CAR yang hingga Juni 2001 telah mencapai 8.78% (*Self assignment*), *Return On Asset* (ROA)-nya sebesar 5.79% dan *Non Performing Loan* (NPL)-nya hanya sebesar 2.43% atau di bawah ketentuan minimal BI sebesar 5%. Selain itu pertumbuhan usaha Bank BTPN hingga Juni 2001 menunjukkan perkembangan yang semakin kokoh dan memberikan prospek yang sangat menggembirakan. Sebagai informasi hasil laba usaha tahun berjalan (hingga Juni 2001) mencapai Rp. 90.0 miliar, dimana untuk sektor perbankan, pencapaian posisi laba tersebut merupakan perolehan yang cukup baik di tengah perekonomian nasional saat ini. Dengan total asset yang mencapai Rp. 2.652 triliun, hingga saat ini Bank BTPN tetap konsisten untuk melakukan usaha pemberian kredit dimana jumlah kredit yang dikucurkan pada tahun 2001 (per Juni 2001), telah mencapai Rp. 1.745 triliun atau tumbuh Rp. 79.866 miliar dibanding akhir tahun 2000, dengan jumlah peminjam sebanyak 432.000 orang.

Hasil perkembangan usaha Bank BTPN selama ini menunjukkan bahwa bank ini tidak hanya memperoleh kemajuan materil, akan tetapi telah memperoleh kepercayaan yang sangat baik dari masyarakat dan juga dari pemerintah. Keberhasilan Bank BTPN didukung pula dengan adanya hubungan atau kerjasama yang terjalin baik antara Bank BTPN dengan PT. Taspen, PT. Posindo, Asabri dan Organisasi Pensiunan Pepabri, PWRI, LVRI dan institusi terkait lainnya serta peran serta pemilik dan manajemen yang tetap konsisten dalam menentukan arah kebijakan perusahaan yang didukung oleh kinerja yang baik dari seluruh karyawan dan yang tidak kalah pentingnya peran serta nasabah yang cukup besar andilnya terhadap kemajuan Bank BTPN.

Oleh karena itu, Bank BTPN mempunyai visi “menjadi bank terbaik di Indonesia dengan fokus usaha di bidang ritel khususnya dalam pelayanan nasabah pensiun”. Sedangkan misi Bank BTPN adalah “komitmen yang tinggi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah, melalui kerjasama sebagai suatu tim yang tangguh dengan dilandasi sikap kerja yang profesional, serta konsistensi dan patuh terhadap ketentuan yang berlaku, dalam rangka melaksanakan prinsip *prudential banking* untuk mencapai Bank BTPN yang sehat, besar dan sejahtera”.

Selanjutnya kegiatan operasional Bank BTPN didukung jaringan kantor sebanyak 227 kantor/outlet, yang tersebar di hampir seluruh wilayah propinsi di Indonesia. Jaringan kantor tersébar mulai dari propinsi, kotamadya, kabupaten dan kecamatan, serta didukung pula oleh Kas Mobil dan ATM bersama dengan jumlah karyawan saat ini mencapai 3.200 orang.



2.2 Struktur Organisasi

Pengertian struktur organisasi adalah suatu gambaran skematis tentang hubungan kerjasama antara departemen yang terdapat dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan.

Dalam suatu perusahaan struktur organisasi mempunyai peranan penting, karena dalam struktur tersebut masing-masing bidang kerja terlihat jelas bagaimana suatu bidang kerja dapat berjalan lancar dan seefisien mungkin, juga struktur organisasi yang menjadi dasar organisasi ini adalah pembagian kekuasaan dan tanggung jawab.

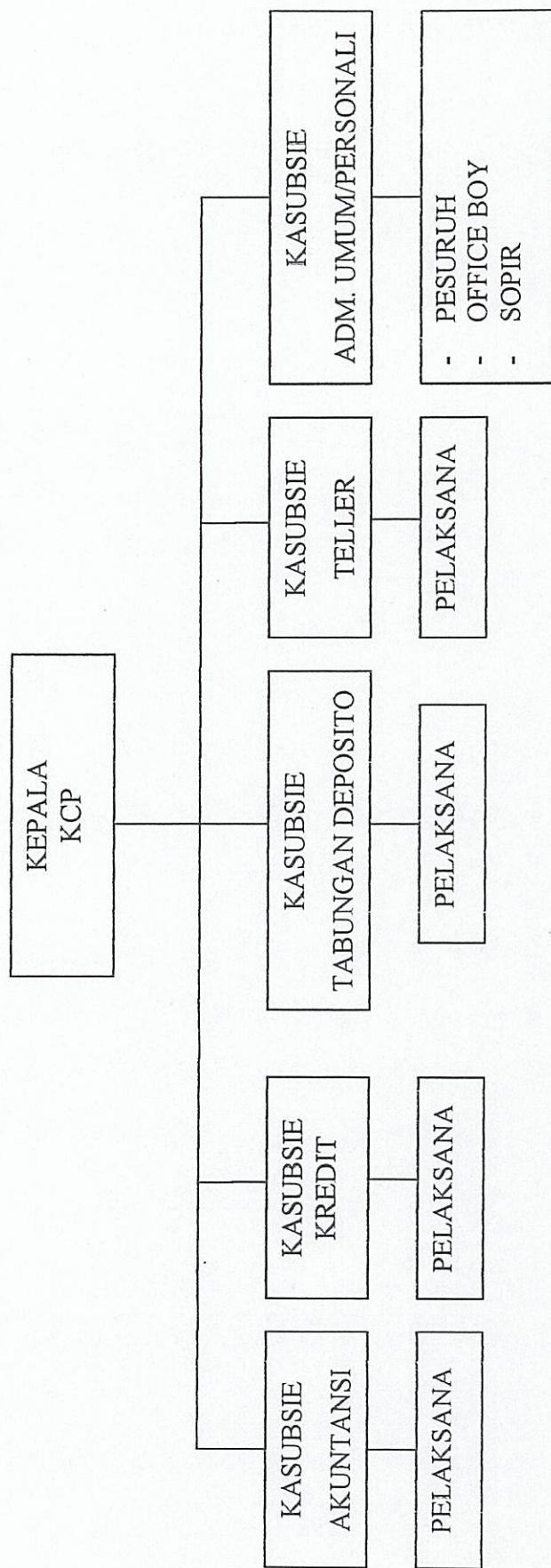
Struktur organisasi memegang peranan penting dalam setiap perusahaan, karena di dalamnya tercantum jelas masing-masing bidang kerja yang harus dijalankan oleh yang berkepentingan dan struktur organisasi itu harus dirancang dan dibuat sesuai dengan perkembangan organisasi dan kemampuannya. Biasanya dibuat dan dirancang oleh pemimpin perusahaan.

Melalui struktur organisasi maka akan terlihat tugas masing-masing bagian, sehingga dapat menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya fungsi dan tugas terhadap perusahaan.

Berikut ini adalah wewenang dan tanggung jawab yang tercakup di dalam struktur organisasi Bank BTPN Kcp. Cikapundung.

1. Kepala Kcp
2. Kasubsie Akuntansi yang membawahi Pelaksana.
3. Kasubsie Kredit yang membawahi Pelaksana.
4. Kasubsie Tabungan Deposito yang membawahi Pelaksana.
5. Kasubsie Teller yang membawahi Pelaksana.
6. Kasubsie Adm Umum/Personalia yang membawahi :

**STRUKTUR ORGANISASI
BTPN KCP CIKAPUNDUNG**



- a. Pesuruh
- b. Cleaning Sevice
- c. Pengemudi/Sopir

Struktur organisasi yang digunakan oleh Bank BTPN KCP Cikapundung adalah struktur organisasi garis/linear. Di dalam struktur organisasi garis, kekuasaan mengalir secara langsung dari Direktur kepada Kepala Bagian dan kemudian terus ke karyawan-karyawan dibawahnya, dimana masing-masing bagian merupakan unit yang berdiri sendiri dan Kepala Bagian menjalankan semua fungsi pengawasan di bagianya.

Ciri-ciri Organisasi garis/linear :

1. Tujuan Organisasi masih sederhana
2. Organisasi kecil
3. Jumlah karyawan sedikit
4. Pimpinan dan sesama karyawan saling mengenal
5. Hubungan antara pimpinan dan karyawan bersifat langsung.

Kelemahan daripada organisasi garis/linear ini adalah :

- a. Kesempatan karyawan untuk berkembang sangat terbatas
- b. Seluruh organisasi terlalu bergantung kepada satu orang, sehingga kalau seseorang itu tidak mampu, maka seluruh organisasi akan terancam kehancuran.

2.3 Deskripsi Jabatan

Uraian Tugas (*Job Description*) : **DIREKTUR UMUM**

1. JOB TITLE : Kepala KCP

2. BERTANGGUNGJAWAB KEPADA : Kepala KPO
3. LINGKUP PENGAWASAN KERJA : Seluruh Karyawan KCP
4. KEWENANGAN : 1. Mengambil keputusan atas masalah-masalah di KCP dalam batas wewenang yang telah ditetapkan.
2. Mengadakan pembagian tugas dan mengkoordinir kegiatan kerja bawahannya.
3. Melakukan penilaian umum (*Performance appraisal*) terhadap seluruh karyawan untuk mendukung pengembangan perusahaan.
4. Menerima laporan pertanggungjawaban kerja dari bawahannya.
5. BATAS KEWENANGAN : 1. Tidak mengambil keputusan yang menyimpang dari batas kewenangan yang telah ditetapkan
2. Tidak memberikan informasi kepada yang tidak berwenang mengenai hal-hal yang

dikategorikan kualifikasinya.

6. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB POKOK : 1. Memantau, mengevaluasi dan menyempurnakan ketentuan - ketentuan kepegawaian ternasuk mengenai kesejahteraannya
2. Memonitor pelaksanaan asuransi karyawan, diantaranya asuransi pensiun, asuransi tenaga kerja (JAMSOSTEK) dan asuransi lainnya.
7. SIGNING POWER
1. Menandatangani nota-nota atau warkat-warkat yang berkaitan dengan pengeluaran biaya kepegawaian
 2. Menandatangani daftar gaji dan emolumen lainnya, khususnya di Kantor Pembantu
 3. Menandatangani surat-surat keluar yang bersifat rutin untuk intern BTPN KCP.

URAIAN KERJA (JOB DESCRIPTION) : BAGIAN TABUNGAN DAN**DEPOSITO**

1. JOB TITLE : Kasubsie Tabungan dan Deposito

2. BERTANGGUNGJAWAB KEPADA : Kepala KCP

3. LINGKUP PENGAWASAN KERJA : Bagian Pelaksana Tabungan dan
Deposito

4. KEWENANGAN : 1. Merencanakan program kerja
dan anggaran tahunan Bagian
Tabungan dan Deposito

2. Memberikan bimbingan,
pengarahan dan petunjuk kerja
kepada bawahan

3. Meminta laporan dan
pertanggungjawaban kerja dari
bawahan

5. BATAS KEWENANGAN : 1. Tidak mengambil keputusan
yang menyimpang dari batas
kewenangan yang telah
ditetapkan

2. Tidak memberikan informasi
kepada yang tidak berwenang
mengenai hal - hal yang di

kategorikan rahasia Bank.

6. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB : 1. Meneliti dan menganalisa pembukuan tabungan dan deposito di KCP dan menyampaikan kesimpulannya kepada kepala KCP
2. Membuat laporan atas pembukuan tentang tabungan dan deposito sesuai dengan yang telah ditetapkan
7. SIGNING POWER : 1. Menandatangani nota-nota atau warkat-warkat yang berkaitan dengan
2. Pemasukan dan Pengeluaran deposito

2.4 Aspek Kegiatan Perusahaan

Bank BTPN memberikan pelayanan jasa perbankan kepada masyarakat luas berupa penerimaan simpanan, pemberian pinjaman maupun jasa perbankan lainnya, diantaranya :

A. Bank BTPN menerima masyarakat dalam bentuk :

Simpanan Giro, terdiri dari :

- a. Rekening Atas Nama Badan

Termasuk dalam golongan ini adalah rekening atas nama :

1. Intansi Pemerintah/Lembaga-lembaga Negara dan Organisasi masyarakat yang tidak merupakan perusahaan
2. PT, CV, Yayasan, Koperasi dan semua badan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang atau peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Rekening Perorangan

Adalah rekening atas nama pribadi dan rekening yang tidak termasuk dalam golongan point diatas, tetapi menggunakan nama dagang, seperti : Kongsi, toko, restoran, bengkel dan lain-lain.

c. Rekening Gabungan (*Joint Account*)

Adalah rekening ats nama beberapa orang (pribadi) beberapa badan dan atau campuran keduanya.

Tabungan, terdiri dari :

a. Tabungan Citra

Ialah tabungan yang diselenggarakan oleh Bank BTPN bagi masyarakat umum dengan menawarkan bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan Tabungan Kesra

b. Tabungan Kesra

Ialah tabungan yang diselenggarakan oleh Bank BTPN bekerjasama dengan 18 Bank umum lainnya. Tabungan Kesra menawarkan hadiah bagi para penabungnya.

c. Tabungan Pensiunan

Ialah tabungan yangdisediakan bagi para pensiunan. Tujuannya adalah untuk menyimpan uang sementara apabila sampai batas waktu

pengambilan uang pensiunan, ternyata belum diambil juga walaupun tidak mengajukan pembukaan tabungan.

Deposito Berjangka

- a. Deposito Berjangka
- b. Sertifikat Deposito

B. Pinjaman yang diberikan oleh BTPN antara lain :

- 1. Kredit Pensiunan
- 2. Kredit Pegawai Aktif (Pegawai Negeri Sipil ABRI, BUMN, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah).
- 3. Kredit untuk kegiatan usaha terutama Kredit Usaha Kecil.
- 4. Kredit investasi.
- 5. Kredit Deposan Bank BTPN.
- 6. Kredit Program KUT, KKPA, dan lain-lain.
- 7. Kredit umum lainnya.

C. Jasa-jasa yang diberikan oleh BTPN antara lain :

- 1. Kliring, adalah proses penyelesaian utang piutang bank pada suatu wilayah kliring tertentu dan dilakukan secara sentralistik (terpusat) di lembaga kliring atau Bank Indonesia atau bank lain yang ditunjuk oleh BI sebagai penyelenggara sehingga proses pembayaran dalam masyarakat menjadi lebih cepat, aman, efektif dan efisien.
- 2. Transfer, adalah pemindahan dana dari suatu bank atau cabang kepada Bank atau cabang lain dalam kota atau antar kota.

3. Inkaso, adalah proses penagihan Cek/BG dan warkat lain yang sejenis di luar wilayah kliring, dimana hasilnya setelah dipotong ongkos akan dikreditkan untuk keuntungan nasabah setelah diterimanya pernyataan tertulis mengenai tidak ditolaknya warkat tertagih.
4. Payment point, adalah suatu jasa yang diberikan untuk mendapatkan fee based income dari pembayaran telepon, PLN dan PDAM.
5. Payroll service, adalah salah satu upaya dalam meningkatkan fee based income dari jasa pembayaran gaji baik gaji pensiunan maupun karyawan aktif yang ada di badan usaha swasta maupun BUMN (pembayaran gaji pensiunan).
6. Bank Persepsi, adalah salah satu pelayanan oleh Bank BTPN dalam bentuk menerima pembayaran pajak masyarakat atau nasabah.